

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga tujuan inti dari proses pembangunan, antara lain yaitu meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap tiap negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) (Mirza, 2014: 102). Melalui pendekatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak

ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Dalam beberapa Tahun terakhir tingkat kualitas manusia di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang selalu meningkat dan masuk dalam kategori High Human Development. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan angka indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Pemerintah pun sudah mencanangkan beberapa program di berbagai sektor. Contoh sektor tersebut adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor kesehatan pemerintah memberikan banyak fasilitas diantaranya membangun gedung sekolah yang rusak, mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas sekolah dengan ditingkatkannya kurikulum sekolah. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidik atau guru dengan diadakannya sertifikasi untuk guru pegawai negeri sipil. Di bidang kesehatan pemerintah juga memiliki program yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Program tersebut adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu pemerintah juga memperbaiki kualitas baik itu berupa alat alat kesehatan maupun bangunan puskesmas dan rumah sakit daerah di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Dua sektor tersebut selalu diperbaiki pemerintah setiap tahunnya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

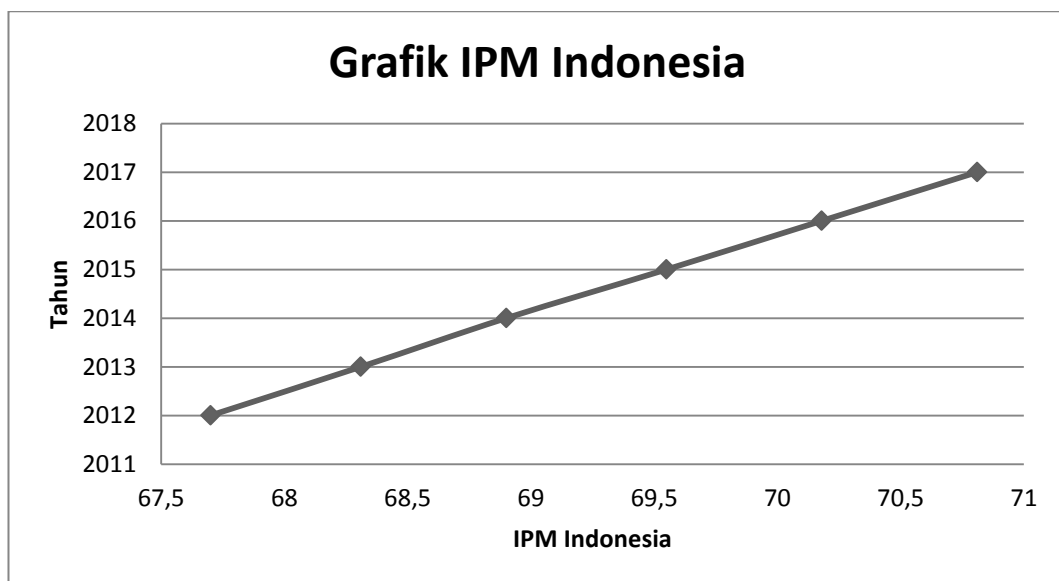
قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَفْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا ذَا وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan/25: 67).

Ayat diatas berkesinambungan dengan variabel anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran tersebut agar dapat meningkatkan range indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Menurut BPS Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus membaik setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keempat. Namun, IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. Dari 33 provinsi di Indonesia hanya ada 2 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mempunyai range IPM 75-80 dalam persen (BPS, 2012). Hal ini menarik karena hanya ada 2 provinsi di Pulau Jawa yang memiliki range IPM diatas 75, sementara 4 Provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten masih memiliki IPM dibawah range 75. Sementara menurut data BPS Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Kediri dan Kota Cirebon memiliki trend kenaikan IPM setiap tahunnya. Selain itu 10 kota diatas memiliki data yang lengkap dalam anggaran setiap tahunnya di kemenkeu, baik itu anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks sektor pendidikan, indeks sektor kesehatan, dan jumlah kemiskinan. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Berikut adalah table data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2012-2017.



Sumber : BPS Indonesia

**Gambar 1. 1**

**Data IPM Indonesia (dalam persen)**

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM

Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2016–2017, IPM Indonesia tumbuh 0,90 persen.

**Tabel 1. 1**  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2017

Provinsi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Barat	67,32	68,25	68,80	69.50	70.05	70.69
Jawa Tengah	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52
DIY	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
DKI Jakarta	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06
Jawa Timur	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27
Banten	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42

Sumber BPS Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Provinsi Jawa Timur selalu memiliki IPM terendah di Pulau Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan IPM setiap tahunnya. DKI Jakarta yang merupakan Provinsi dengan IPM tertinggi yaitu 80,06 kemudian diikuti DIY dengan 78,89 lalu ada Banten 71,42 , kemudian Jawa Tengah mengikuti 70,52 , Jawa Barat 70,69 dan yang terakhir Jawa Timur 70,27. IPM Jawa Timur merupakan yang terendah di Pulau Jawa, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan unsur-unsur pembangunan manusia antara lain: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat

diukur dari pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2004). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi mengakibatkan naiknya produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut Mirza (2012), investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti pada penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memudahkan penduduk miskin dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang murah untuk kemudian nantinya akan meningkatkan taraf hidup penduduk miskin.

**Tabel 1. 2**  
Data Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa (dalam ribu jiwa)

Provinsi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	366.77	375.70	412.79	368.67	385.84	393.13
Jawa Barat	4421.48	4382.65	4238.96	4485.65	4168.11	3774.41
Jawa Tengah	4863.41	4704.87	4561.82	4505.78	4493.75	4197.49
DI Yogyakarta	562.11	535.18	532.59	485.56	488.83	466.33
Jawa Timur	4960.54	4865.82	4748.42	4775.97	4638.53	4405.27
Banten	648.25	682.71	649.19	690.67	657.74	699.83

Data BPS Indonesia

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Statistik Indonesia menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa

mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2017, tetapi untuk Provinsi DKI Jakarta dan Banten mengalami kenaikan Jumlah penduduk Miskin dari tahun 2012 ke tahun 2017

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka penulis hanya membahas pada :

1. Penelitian ini meneliti 10 kota pilihan di Pulau Jawa
2. Penelitian ini memiliki batasan tahun yakni 2012-2017
3. Variabel yang digunakan terdiri atas;
  - a. Indeks Pembangunan Manusia
  - b. Jumlah Penduduk miskin
  - c. Anggaran Pemerintah daerah bidang kesehatan
  - d. Anggaran Pemerintah daerah bidang pendidikan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh anggaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh anggaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh anggaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh anggaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan informasi, referensi, literatur tentang indeks pembangunan manusia dan pengaruh anggaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa.
- b. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa dan pengaruh anggaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa.



## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Pulau Jawa.

### **b. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan kemampuan menganalisis terhadap permasalahan ekonomi dalam bidang indeks pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya.